



ELSE (Elementary  
School Education  
Journal)



This is an open access article  
under the [Creative Commons  
Attribution-ShareAlike 4.0  
International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**OPEN ACCESS**

**e-ISSN 2597-4122**

**(Online)**

**p-ISSN 2581-1800**

**(Print)**

**\*Correspondence:**

*M. Ega.Zamaludin*  
[egazamaludin08@gmail.com](mailto:egazamaludin08@gmail.com)  
[ail.com](http://ail.com)

**Received:** 08-07-2023

**Accepted:** 30-08-2024

**Published:** 31-08-2024

**DOI**

<http://dx.doi.org/10.30651/else.v8i2.19168>

# IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

**M. Ega Zamaludin<sup>1\*</sup>, Dine Meigawati<sup>1</sup>, Rizki Hegia Sampurna<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

## Abstrak

Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin, di daerah diharapkan agar pemerintahan yang menangani pembagian KIP ini, di seleksi sebaik mungkin untuk menghindari salah sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Periode 2021/2022. Dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam Kegiatan Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Periode 2021/2022. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini unit analisis yang menjadi objek atau lokasi penelitian adalah lembaga atau instansi yaitu 3 sekolah dasar di Kecamatan Cikole. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tiga sekolah dasar tersebut berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Program KIP ditujukan untuk anak usia 6-12 tahun dari keluarga miskin, rentan miskin, dan keluarga penerima program sosial lainnya. Besaran dana program KIP yang diterima siswa berkisar antara 225.000 hingga 450.000 rupiah per tahun. Implementasi program ini dianggap berhasil dalam upaya pemerataan pendidikan, terutama dalam mengurangi kemungkinan siswa putus sekolah (drop out) akibat keterbatasan biaya.

**Kata Kunci: Implementasi, Kartu Indonesia Pintar, Pendidikan Sekolah Dasar**

## Abstract

The Smart Indonesia Card (KIP) must be right on target so that it can be used as well as possible, in the regions it is hoped that the government that handles the distribution of this KIP, is selected as well as possible to avoid mistargeting. The purpose of this research is to find out the implementation of the Smart Indonesia Card program in Efforts to Equalize Public Elementary School Education in Cikole District, Sukabumi City 2021/2022 Period. And to find out the supporting and inhibiting factors in the Implementation of the Smart Indonesia Card Program in the Education Equality Activities of Public Elementary Schools in Cikole District, Sukabumi City 2021/2022 Period. To achieve the research objectives, the researcher used a descriptive qualitative approach method. In this study, the unit of analysis that is the object or research location is an institution or agency, namely 3 elementary schools in Cikole District. The results showed that the implementation of the Smart Indonesia Card Program (KIP) in the three elementary schools was in accordance with the implementation instructions set by the Ministry of Education and Culture. The KIP program is intended for children aged 6-12 years from poor, vulnerable poor families, and families receiving other social programs. The amount of KIP program funds received by students ranges from 225,000 to 450,000 rupiah per year. The implementation of this program is considered successful in the effort to equalize education, especially in reducing the possibility of students dropping out due to financial constraints.

**Keywords: Implementation, Smart Indonesia Card, Primary School Education**

## PENDAHULUAN

Indonesia mengalami permasalahan yang cukup serius dalam pendidikan, yaitu bagaimana pemerataan pendidikan dari sabang hingga merauke dan menyediakan pendidikan yang berkualitas dan unggul. Tantangan – tantangan ini semakin hari semakin sulit, mengingat standar kualitas sumber daya manusia yang semakin naik pula. Oleh karenanya pemerintah mengupayakan dengan optimal untuk mampu menjawab kedua tantangan tersebut. Yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia (Nikmah et al., 2020).

Dalam menjalankan Program Indonesia Pintar, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pencapaian tujuan memerlukan tindakan proaktif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dalam mencapai tujuan (Rohaeni & Saryono, 2018). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan mandatnya melaksanakan program Indonesia Pintar yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan anak usia 6-21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan hingga tamat pendidikan menengah dan mencegah siswa putus sekolah.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran agar dapat digunakan dengan sebaik mungkin, di daerah diharapkan agar pemerintahan yang menangani pembagian KIP ini, di seleksi sebaik mungkin untuk menghindari salah sasaran. Karna di setiap daerah di Indonesia banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, mereka yang sangat membutuhkan dana dan biaya untuk membantu meringankan perekonomian keluarga (Indah Cahyaningsih, 2018). Masyarakat Indonesia

diharapkan agar menggunakan Kartu Indonesia Pintar dengan sebaik mungkin, guna membantu program pemerintah yaitu menekan angka putus sekolah yang dilatar belakangi oleh bi aya. Jadi, masyarakat harus sejalan dengan program pemerintah ini. Sebagai orang tua agar lebih bijak dalam membelikan perlengkapan sekolah anak, dengan demikian biaya yang dikeluarkan dapat seefektif mungkin, membeli seperlunya saja (Sari, 2020).

Di luar sekolah manfaat KIP diharapkan dapat memastikan siswa dapat melanjutkan studinya hingga tamat pendidikan menengah dan menarik siswa atau mahasiswa yang tidak melanjutkan studi kembali ke layanan pendidikan. PIP tidak hanya diperuntukkan bagi siswa sekolah, tetapi juga berlaku bagi siswa pusat pembelajaran (SKB), pusat pembelajaran masyarakat (PKBM) dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya. kriteria yang ditetapkan dikonfirmasi (Gutama et al., 2022). Jika besaran target KIP tahun 2021 mencapai 20,3 juta anak usia sekolah/siswa di sekolah/lembaga pendidikan baik di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (17,9 juta anak/pelajar) maupun Kementerian Agama (2,4 juta anak/pelajar), diharapkan dapat memenangkan golongan bawah dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan yang lebih baik (Djoyosuroto et al., 2018).

Kartu Indonesia pintar ini diberikan keseluruh provinsi di Indonesia, sesuai dari penyedia jasa pengiriman Kartu Indonesia Pintar. Setiap daerah , masyarakat di data dan di seleksi guna mendapatkan masyarakat yang benar benar membutuhkannya. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat guna membiayai pendidikan anaknya dan menekan angka putus sekolah yang dari tahun ketahun semakin meningkat (Nurusshobah, 2019). Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bantuan tunai pendidikan sampai lulus sekolah menengah ke atas dengan usia anak sekolah 6-21 tahun. Sasaran penerima KIP

adalah penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ataupun yang terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari keluarga kurang mampu (Zamjani, 2019).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa fenomena terkait Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yaitu:

- a. Berdasarkan SE Puslapdik Kemendikbud Nomor 0641/J5/DM.00.03/2021, NIK dan NISN sebagai syarat penetapan penerima bantuan PIP. Dari hasil pemadanan data antara data dari Dapodik dan DTKS, masih adanya beberapa ketidakcocokan data peserta didik seperti NIK dan NISN, sehingga Puslapdik Kemendikbudristek belum bisa memverifikasi dan memvalidasi data usulan KIP tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, kuota penyaluran KIP pada tahun 2021 jenjang SD negeri maupun swasta di wilayah Kecamatan Cikole yaitu 1.701 siswa. Adapun usulan tahun 2021 tiap sekolah negeri di Kecamatan Cikole sebagai berikut :

**Tabel 1. kuota penyaluran KIP pada tahun 2021-2022 jenjang SD negeri maupun swasta di wilayah Kecamatan Cikole**

No	Tahun	Usulan	Yang menerima	Tidak menerima
1.	2021	1.175	211	447
2.	2022	572	80	492

Dari data diatas bahwa sekolah dasar negeri di Kecamatan Cikole yang mengusulkan KIP berjumlah 1.175 siswa, yang menerima berjumlah 211 siswa, dan yang tidak menerima berjumlah 447 siswa. Adapun usulan fase berjalan pada tahun 2022 tiap sekolah negeri di Kecamatan Cikole yakni sekolah dasar negeri di Kecamatan Cikole yang mengusulkan PIP berjumlah 572 siswa, yang menerima berjumlah 80 siswa, dan yang tidak menerima berjumlah 492 siswa.

- b. Di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 ditegaskan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud No 7 Tahun 2021 bahwa dua kategori peserta didik yang berhak menerima bantuan PIP, kategori yang pertama berasal dari keluarga yang tercatat di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Kategori yang kedua adalah masyarakat miskin atau rentan miskin namun karena berbagai hal tidak tercatat di DTKS dan lantas diusulkan oleh dinas pendidikan atau pemangku kepentingan, seperti DPR atau Lembaga lainnya. Maka dengan itu pihak sekolah dan pihak terkait belum sepenuhnya melakukan koordinasi mengenai kevalidan data terkait syarat dalam proses pengusulan bantuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai **"IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI"**.

Untuk mendukung penelitian ini, pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa hasil studi implementasi sebelumnya Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun Ajaran 2021/2022. Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017). Kajiannya menunjukkan Kepemilikan KIP mendukung pemerataan pendidikan, dibuktikan dengan kondisi dan keadaan keluarga peserta didik penerima kartu jaminan sosial dan tekad mereka untuk menetap di Dapodik. Selanjutnya penelitian yang dilakuakn oleh Nasution (2017), menunjukan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri 1 Tanjungbalai belum berjalan dengan efektif, karena masih banyak siswa yang tidak mendapat Kartu Indonesia Pintar, kurangnya partisipasi bank dalam penyaluran dana membuat pelaksanaan program

tidak berjalan tepat waktu, serta lambatnya bank penyalur menyebabkan penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar terbengkalai. Selain itu strategi pencapaian program Kartu. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2018), menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di Desa Rompegading Kecamatan Senrana Kabupaten Maros berjalan dengan baik yang diukur dengan indikator hubungan antar organisasi, keterlibatan dan koordinasi antar organisasi. Jadi aparat desa dan guru sekolah terus berkoordinasi.

## METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif dekriptif yaitu mendeskripsikan keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti dengan cara mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya untuk mewujudkan tujuan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada masalah proses, makna, pemahaman, interaksi serta kompleksitas.

Dalam penelitian ini unit analisis yang menjadi objek atau lokasi penelitian adalah lembaga atau instansi yaitu 3 sekolah dasar di Kecamatan Cikole dan untuk menentukan informan dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk meneliti dan memberikan tanggapan langsung terhadap permasalahan yang digali dalam penelitian ini guna memperoleh informasi penelitian tentang implementasi program kartu pintar di Indonesia. Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2022-2023.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik memperoleh data dari beberapa buku bacaan serta dokumen dan foto subyek penelitian di lapangan untuk melengkapi data pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2022-2023.

### c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara pengamatan langsung di tempat sebelum melakukan penelitian terhadap pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2022-2023.

Teknik analisis data penelitian ini mengingat hasil yang diperoleh merupakan data kualitatif yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penelitian ini menggunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa pengumpulan data, reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan *interactive mode* milik Sugiyono. Teknik analisis data dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memberikan deskripsi tentang tiga lokasi penelitian di Kecamatan Cikole, yaitu SD Negeri Kibodas, SD Negeri Cimanggung 1, dan SD Negeri Kabandungan. SD Negeri Kibodas terletak di wilayah strategis dengan akses transportasi yang baik dan jumlah siswa yang cukup banyak. Sekolah ini memiliki fasilitas yang mencakup ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, mushola, dan lapangan. SD Negeri Cimanggung 1 juga memiliki jumlah siswa yang cukup banyak dan fasilitas yang memadai. Terakhir, SD Negeri Kabandungan terletak di wilayah utara Kecamatan Cikole dan mayoritas siswanya berasal dari Kabupaten Sukabumi. Ketiga sekolah tersebut memiliki akreditasi baik dan menjalankan kegiatan belajar mengajar

sesuai kebijakan pemerintah selama pandemi COVID-19.

Selanjutnya, penelitian ini melibatkan tahapan penelitian lapangan yang mencakup pemilihan informan kunci, wawancara, dan pencatatan hasil wawancara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data-data lapangan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, triangulasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan hasil penelitian secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tiga sekolah dasar tersebut berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Program KIP ditujukan untuk anak usia 6-12 tahun dari keluarga miskin, rentan miskin, dan keluarga penerima program sosial lainnya. Besaran dana program KIP yang diterima siswa berkisar antara Rp. 225.000 hingga Rp. 450.000 per tahun. Implementasi program ini dianggap berhasil dalam upaya pemerataan pendidikan, terutama dalam mengurangi kemungkinan siswa putus sekolah (*drop out*) akibat keterbatasan biaya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sekolah dasar di Kecamatan Cikole dan implementasi Program KIP dalam upaya pemerataan pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran Program KIP dalam mendukung akses pendidikan yang merata bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Sukabumi Tahun Pelajaran 2022-2023" (studi kasus 3 Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cikole) SD Negeri Kibodas, SD Negeri Cimanggung 1 dan SD Negeri Kabandungan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

#### A. Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Yuliah (2020) implementasi kebijakan yang berhasil menuntut pelaksana untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Anda harus mengkomunikasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) apa tujuan dan sasaran kebijakan Anda untuk mengurangi bias implementasi. Jika tujuan kebijakan tidak jelas atau sama sekali tidak diketahui oleh kelompok sasaran, resistensi dari kelompok sasaran dapat diharapkan. Hasil penelitian yang dilakukan di tiga sekolah dasar melalui wawancara yang mendalam dengan beberapa informan yaitu Kepala Sekolah, pengelola program PIP, siswa dan juga orangtua penerima bantuan PIP. Adapun di setiap lokasi penelitian menjelaskan bahwa kebijakan mengenai program KIP/PIP untuk anak sekolah dasar sesuai dengan Persetjen atau Persesjen Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juknis Juklak) Kartu Indonesia Pintar (KIP) Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (SD SMP SMA SMK) Tahun 2021. diperuntukan untuk anak usia 6-12 tahun, dengan prioritas sasaran berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu KIP, peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan, peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera.

Peserta Didik yang berstatus yatimpiatu/yatim/piatu dari sekolah/panti, peserta didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah, Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah atau Peserta pada lembaga kursus atau

satuan pendidikan nonformal lainnya. penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah, tapi yang paling penting yaitu status siswa sudah terdaftar di Dapodik. Besaran dana program PIP ditingkat sekolah dasar dari minimal 225.000/tahun sampai dengan 450.000/tahun yang diterima siswa.

Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan khususnya di sekolah dasar sangat membantu dan diharapkan pihak sekolah dan orangtua khususnya dapat berjalan dengan baik melalui mekanisme yang lebih cepat serta tepat, karena dengan adanya bantuan dana KIP dapat membantu mengurangi kemungkinan siswa tidak dapat melanjutkan sekolah (*drop out*) karena tidak tersedianya biaya serta memastikan agar siswa dari keluarga miskin dan rentan yang berada pada periode transisi (antar jenjang kelas dan jenjang pendidikan seperti dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA) dapat terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun beberapa informan dari orangtua siswa sebagai pihak penerima PIP menyatakan bahwa bantuan dana PIP masih kurang dalam membiayai biaya pendidikan karena dana PIP dipakai dengan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dengan adanya bantuan PIP di sekolah dasar 95% persen siswa tetap bersekolah dan melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah/SMP dan sisanya memilih untuk masuk pondok pesantren dan bekerja membantu orangtua. Menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), "sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan".

#### B. Faktor Pendukung dan Penghambat program PIP/KIP

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program KIP dalam upaya pemerataan pendidikan di tingkat sekolah dasar dikecamatan Cikole. Adapun tujuan dari program PIP adalah Ketersediaan layanan pendidikan Untuk anak-anak berusia 6 tahun, akan diperpanjang hingga 21 tahun sampai dengan perolehan pendidikan menengah, untuk mendukung pendidikan menengah umum/perintis 12 (dua belas) tahun wajib belajar, mencegah siswa putus sekolah atau tidak menyelesaikan studi karena kesulitan ekonomi, Menjaring peserta didik yang putus sekolah atau yang tidak melanjutkan sekolah, pusat kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan gratis lainnya atau pusat pelatihan profesi, Terkait pendidikan tinggi, peningkatan akses pendidikan tinggi dan kesempatan belajar bagi mahasiswa Indonesia yang kurang beruntung secara ekonomi berhasil dengan baik bagi para siswanya di bidang akademik dan non-akademik, Menjamin kesinambungan pembelajaran dan meningkatkan porsi total pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi daerah terpencil, tertinggal dan/atau daerah yang terkena dampak bencana alam dan konflik sosial.

Peneliti menjelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam program PIP sebagai berikut:

##### 1) Faktor pendukung

Faktor pendukung diantara lain yaitu adanya informasi yang diberikan tidak hanya dari Dinas Pendidikan tapi bisa melalui link atau web PIP, keputusan dari pihak pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa, adanya rasa saling percaya terhadap penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar dari siswa dan orang tua serta

sekolah, syarat pengusulan oleh sekolah agar siswa mendapatkan PIP bisa dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau Dinas sosial apabila belum mempunyai kartu KIP, PKH dan KKS ataupun kategori lain yang tidak terpenuhi oleh siswa. Adanya akses lain untuk pengusulan proram PIP dari pihak/lembaga lain dengan persyaratan yang lebih mudah.

## 2) Faktor penghambat

Evaluasi Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan khususnya pada mekanismenya, seperti daftar nominasi siswa penerima bantuan tidak serempak. turunya dana terkadang siswa sudah keluar dari sekolah, dana bantuan baru turun. Ketika siswa sudah memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar (KIP), mereka terkadang lupa bahwa dana tersebut untuk biaya pendidikan bukan untuk membeli kebutuhan lain. Serta terbatasnya pelayanan fasilitas Bank penyalur pada saat pencairan, keterbatasan fasilitas layanan bank penyalur yang tersedia, baik dari sisi kantor pelayanan, jam operasional serta ketersediaan pegawai bank penyalur. Keterbatasan fasilitas layanan tersebut berdampak pada panjangnya antrian pada saat pencairan yang dimana proses pelaporan menjadi terhambat. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Djoyosuroto et al., 2018) yang menyebutkan bahwa evaluasi dari program KIP yang dilaksanakan setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan pada mekanisme serta terjadinya penyelewengan dana KIP. Sedangkan Sulhan & Sasongko (2017) menyebutkan beberapa faktor seperti

yang telah ditentukan serta banyak warga yang tidak tahu tentang bantuan dari pemerintah mengenai KIP dan KPS, sehingga banyak warga disini belum memiliki kartu tersebut

Hasil penelitian Lau (2021) menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SD Inpres Raakfau telah berjalan sesuai dengan pedoman Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu pihak Implementor dalam hal ini Satuan pendidikan SD Inpres Raakfau melakukan sosialisasi mekanisme penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada para siswa maupun orang tua / wali siswa sebelum penetapan nama-nama penerima bantuan tersebut. Sumber daya implementor kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SD Inpres Raakfau terdiri dari dua yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya anggaran.

Implementasi adalah pelaksanaan ide atau rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Suatu konsep implementasi yang menurut masyarakat dikaitkan dengan suatu kegiatan atau tindakan. Namun, implementasi tidak terbatas pada tindakan implementasi. Implementasi juga merupakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan kerja (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Suatu kebijakan/program dibuat untuk menanggapi suatu masalah, yaitu untuk memecahkan, mengurangi, mencegah agar masalah tidak terpecahkan. Namun pelaksanaan suatu program tidak akan jauh dari kata permasalahan yang akan dihadapi di lapangan, akan muncul berbagai kendala untuk mewujudkan cita-cita yang telah dirancang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi program Indonesia Pintar (Femmy et al., 2016). Meter dan Horn (dalam Suaib & Zuada, 2015) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang diambil atau dilakukan oleh negara dan individu (dan kelompok) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kepemilikan KIP sangat mendukung pemerataan pendidikan, hal

ini ditandai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (Astuti, 2017). Dengan demikian program KIP dapat mendukung program pemerintah wajib belajar 12 tahun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi ditiga subjek lokasi penelitian dan beberapa informan sebagai sumber data setelah melakukan validasi data untuk bahan penelitian Implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi yang efektif antara tenaga ahli di setiap sekolah dan pihak terkait dalam mengelola program PIP. Hal tersebut ditunjukkan dengan kesibukan pekerjaan yang lain menghambat proses informasi dan data yang menjadi syarat pengusulan maupun pencairan dana PIP.
2. Keterbatasan sumber daya manusia (tenaga ahli) menjadi faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program PIP. Hal tersebut ditunjukkan dengan tenaga ahli di setiap sekolah yang mengelola PIP belum optimal karena adanya kesibukan pekerjaan yang lain.
3. Disposisi atau perilaku sosial dalam masyarakat (kecemburuan sosial) mempengaruhi implementasi yang tepat dari program PIP. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum tepatnya sasaran penerima bantuan dikarenakan masih adanya kecemburuan sosial yang disebabkan oleh golongan orangtua yang mampu menerima bantuan PIP.
4. Struktur birokrasi yang kurang efektif atau kompleks dalam penyaluran dana PIP menjadi kendala yang menghambat kelancaran program tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencairan dana PIP tidak langsung bisa dicairkan oleh pihak

Bank penyalur terkait karena kebijakan dan fasilitas yang ada di tiap Bank penyalur.

### SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Meningkatkan komunikasi antara tenaga ahli di setiap sekolah dan pihak terkait dalam mengelola program PIP. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin, pelatihan, atau pendampingan untuk memastikan informasi dan data terkait program PIP dapat tersampaikan dengan baik.
2. Mengalokasikan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk mengelola program PIP. Ini dapat mencakup penugasan tenaga ahli khusus yang fokus pada program PIP dan meminimalisir kesibukan pekerjaan yang lain agar
3. Mengadakan program sosialisasi dan edukasi untuk mengubah persepsi masyarakat terkait program PIP. Dalam hal ini, fokus pada membangun pemahaman yang tepat tentang kriteria penerima bantuan dan mengurangi kecemburuan sosial. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, program PIP dapat lebih tepat sasaran.

Menyederhanakan prosedur dan kebijakan penyaluran dana PIP. Ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada, mengidentifikasi hambatan yang memperlambat pencairan dana, dan berkolaborasi dengan bank penyalur untuk memperbaiki fasilitas dan prosedur yang ada. Selain itu, pendirian tempat pengaduan khusus dapat membantu masyarakat atau orang tua menyampaikan pendapat dan mengatasi masalah terkait program PIP (Indah Cahyaningsih, 2018).

### DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R. S. (2017). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 Di Smp N 1 Semin. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 6(2).

- Djoyosuroto, R. S., Prasetyono, D. W., & Mulyani, S. (2018). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) DI SMA Negeri 2 Dumoga. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 1(1).
- Femmy, A. A. E. P. A., Tulus, F. . M. G., & Londa, V. Y. (2016). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di Smk Negeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Urnal Administrasi Publik*, 15(2), 1–23.
- Gutama, A. S., Fedryansyah, M., & Nuriyah, E. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.35872>
- Indah Cahyaningsih, R. (2018). Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP). *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 4(1). <https://doi.org/10.36989/didaktik.v4i1.70>
- LAU, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Inpres Raakfau Kecamatan .... *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*.
- Nasution, D. F. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjungbalai. *Doctoral Dissertation*.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah? *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i2.581>
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar ( PIP ) Melalui Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1).
- Sari, D. N. (2020). Sistem Penunjang Keputusan Dalam Menentukan Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Smp Muhammadiyah 1 Kalirejo. ... (*Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al ...*
- Sartika. (2018). *Implementasi kebijakan kartu Indonesia pintar di Desa Rompegadin Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Suaib, E., & Zuada, L. H. (2015). Fenomena 'Bosisme Lokal' Di Era Desentralisasi: Studi Hegemoni Politik Nur Alam Di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2).
- Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kertu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1).
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153.
- Zamjani, I. (2019). Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Bagi Penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler: Studi Di Empat Daerah Kunjungan Kerja Presiden Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 11(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v11i2.225>